



Paksa Australia Imbang 0-0, Indonesia Bertahan di Posisi 4

Indonesia kembali mengoleksi satu poin pada Pertandingan Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia saat menahan imbang Australia 0-0, Selasa (10/9/2024). Dengan hasil ini menjadikan Garuda sementara meraih 2 poin dan berada di peringkat empat Grup C Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Timnas Indonesia baru akan kembali bermain pada 10 dan 15 Oktober 2024 melawan Bahrain dan China. (Antara)



Fakta-fakta Korupsi Dana Hibah di Jatim

10 Juli 2024

KPK menetapkan 12 tersangka baru dalam kasus suap pokok pikiran (Pokir) terkait dana hibah Pemprov Jatim, termasuk 4 anggota DPRD Jatim.

26 September 2023

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Surabaya, Jawa Timur memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P Simandjuntak hukuman 9 tahun kurungan penjara dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi hukuman kurungan selama 6 bulan penjara.

Majelis hakim mencabut hak politik Sahat Tua P Simandjuntak, melarangnya menduduki jabatan publik selama 4 tahun setelah masa pidana selesai.

Hakim menilai terdakwa Sahat melanggar Pasal 12a jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Awal Kasus

Sahat Tua Simanjuntak, Rusdi, dan Muhammad Chozin (almarhum) ditangkap KPK pada Desember 2022, menerima suap dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng.

Sahat menerima suap untuk memuluskan pencairan dana hibah Pokmas, dengan total sekitar Rp200 miliar cair dari 2020 hingga 2023.

Sementara Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi kini sudah divonis 2,5 tahun penjara. Keduanya mendapat vonis yang cukup ringan karena statusnya sebagai justice collaborator.

Kontruksi kasus

Pemprov Jatim mengalokasikan sekitar Rp7,8 triliun dana hibah untuk badan, lembaga, dan ormas pada 2020 dan 2021.

Dana hibah disalurkan melalui Pokmas untuk proyek infrastruktur hingga pedesaan, berdasarkan usulan anggota DPRD Jatim seperti Sahat.

Sahat menawarkan bantuan untuk memperlancar pengusulan dana hibah dengan imbalan uang muka (ijon), dan Abdul Hamid menerima tawaran tersebut.

Babak Baru Korupsi Dana Hibah di Jatim

Geledah Rumah Mentera Desa, Uang Tunai Disita

Kejutan datang dari pengembangan kasus dugaan korupsi pada pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur (Jatim). Dua minggu setelah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar diperiksa, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah dinas di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan. Penyidik berhasil menyita sejumlah barang, berupa uang tunai dan barang bukti elektronik. Uang panasnya mengalir sejauh mana?

GOVERNMENT (Hal.2)
Hukuman SYL
Diperberat: 12 Tahun
Penjara, Uang
Pengganti Rp44 M

Baca Hal 11....



Hukuman SYL Diperberat: 12 Tahun Penjara, Uang Pengganti Rp44 M

JAKARTA- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjatuhkan putusan 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider empat bulan kurungan kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Menurut hakim, SYL dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi berupa pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI.

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 tahun dan denda sejumlah Rp500 juta subsider empat bulan kurungan," ujar ketua majelis Artha Theresia saat membacakan amar putusan di PT DKI, Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, SYL juga dihukum dengan pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 dan US\$30 ribu subsider lima tahun penjara.

Putusan ini mengakomodasi tuntutan jaksa KPK. Hanya saja, pidana penjara atas uang pengganti yang tidak dibayar lebih berat dari jaksa KPK yang sebelumnya meminta hukuman empat tahun penjara.

Perkara nomor: 46/PID.SUS-TPK/2024/PT DKI ini diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Artha Theresia dengan hakim anggota Subachran Hardi Mulyono, Teguh Harianto, Anthon R Saragaih, dan Hotma Maya Marbun.

Majelis hakim PT DKI menilai alasan dan pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum karena mempertimbangkan secara saksama unsur-unsur yang didakwakan. Namun, majelis hakim PT DKI tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama terhadap SYL.

Menurut majelis, SYL sebagai menteri tidak memberikan contoh atau teladan yang baik sehingga hukuman harus diperberat dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Menimbang bahwa terdakwa sebagai Menteri Pertanian yang mendapat kepercayaan dari presiden dan telah berpengalaman sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, maka semestinya dapat memberi contoh kepada jajaran pejabat di bawahnya untuk bekerja sesuai peraturan perundang-undangan. Utamanya dalam penggunaan anggaran yang harus sesuai dengan peruntukannya," ujar ketua majelis Artha Theresia saat membacakan bagian pertimbangan di



Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengenakan rompi tahanan KPK.(dok)

PT DKI, Selasa (10/9).

"Pidana badan dan denda yang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat sehingga harus diperberat," ucap hakim.

Vonis pada tingkat banding ini lebih berat daripada putusan majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang menghukum SYL dengan pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp300 juta subsider empat bulan kurungan ditambah uang pengganti sejumlah Rp14.147.144.786 dan US\$30 ribu subsider dua tahun penjara.

Tindak pidana pemerasan dilakukan SYL bersama-sama dengan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan nonaktif Muhammad Hatta dan Sekretaris Jenderal Kementan nonaktif Kasdi Subagyo yang putusan bandingnya juga akan dibacakan pada hari ini.

KPK Mengapresiasi

Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Meyer Volmar Simanjuntak mengapresiasi putusan majelis hakim tingkat banding tersebut.

"Tim JPU mengapresiasi atas putusan PT dengan terdakwa SYL oleh karena mengabulkan memori banding Penuntut Umum," kata Meyer Volmar Simanjuntak dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).

Langkah berikutnya, kata Meyer, KPK menunggu salinan putusan lengkap dari PT DKI Jakarta untuk selanjutnya dibahas bersama Pimpinan KPK.

"Mengenai tuntutan tentang uang pengganti yaitu sebesar kurang lebih Rp44 miliar dan mengabulkan pula tuntutan pidana kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun," tutur Meyer.

"Selanjutnya JPU menunggu salinan lengkap putusan PT diserahkan secara resmi ke KPK dan akan mempelajari putusan tersebut

dan akan melaporkan secara resmi ke Pimpinan untuk langkah tindak selanjutnya," ucapnya menambahkan.

Terbaru KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pengadaan X-Ray di Badan Karantina Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) kurun waktu 2021. Penyidikan perkara itu dimulai sejak 12 Agustus 2024 lalu.

Merujuk tahun pengadaan, Kementerian Pertanian dipimpin oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL) selaku menteri. Saat ini, SYL telah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta yang kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi 12 tahun terkait kasus pungli di lingkungan Kementan.

Putra SYL bernama Kemal Redindo Syahrul Putra juga sempat dipanggil oleh KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus X-Ray itu. Meskipun, ia tak memenuhi panggilan tersebut.

Keterlibatan SYL dalam perkara korupsi X-Ray ini pun turut dipertanyakan. Lantas, apa kata KPK soal ini?

"Atas pertanyaan tersebut, penyidik hanya bisa menyampaikan sementara didalami," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto, kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).

Tessa juga mengungkapkan bahwa terdapat potensi kerugian negara dalam kasus korupsi ini yang mencapai Rp82 miliar.

"Terkait hal tersebut, informasi terakhir atas penghitungan awal yang sudah dilakukan oleh auditor itu sekitar kurang lebih Rp 82 miliar potensi kerugian negaranya," ucap Tessa.

Akan tetapi, Tessa belum bisa membeberkan lebih lanjut terkait berapa jumlah X-Ray yang diduga dikorupsi dalam kasus ini.

"Belum dibuka lebih lanjut apa saja oleh penyidik. Informasi yang bisa di-share hanya nilai potensi kerugiannya saja," jelas dia.

SYL belum berkomentar soal adanya penyidikan KPK terkait

Vonis Berat Syahrul Yasin Limpo

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

- Syahrul Yasin Limpo dijatuhi vonis 10 Tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan.
- SYL juga dijatuhi pidana tambahan berupa kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp14,1 miliar ditambah 30.000 Dolar Amerika Serikat. Dia harus membayar uang pengganti paling lambat 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta

- Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat hukuman mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi 12 tahun bui.
- Menghukum Syahrul Yasin Limpo membayar uang pengganti sejumlah Rp44.269.777.204 atau Rp44 miliar dan 30 ribu Dolar Amerika Serikat.
- Majelis hakim tingkat banding juga mewajibkan Syahrul Yasin Limpo membayar denda sebesar Rp500 juta. Dengan ketentuan, jika denda tidak dibayar dapat diganti pidana kurungan selama 4 bulan.

penyidikan kasus X-Ray ini.

Dalam penyidikan kasus ini, KPK juga telah memeriksa eks Sekretaris Badan Karantina Pertanian Wisnu Haryana pada Senin (9/9). Bahkan, Wisnu juga telah mengakui dirinya menjadi tersangka dalam kasus tersebut.

"[Diperiksa] terkait dengan pengadaan. Sebagai tersangka," ujar Wisnu saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Senin (9/9/2024).

Sudah ada tersangka yang dijerat dalam perkara tersebut. Meski demikian, identitasnya belum diungkap.

KPK juga telah melakukan pencegahan terhadap enam orang dalam kasus korupsi ini. Pencegahan dilakukan berdasarkan Surat Keputusan nomor: 1.064 tahun 2024. Keenam orang yang dicegah itu berinisial WH, IP, MD, SUD, CS, dan RF.

KPK belum membeberkan konstruksi perkara tersebut, termasuk modus hingga pasal yang dijeratkan kepada para tersangka. (sum,ist, rls/dya)

RUU Wantimpres RI Disepakati Batal Jadi DPA, Terpidana di Bawah 5 Tahun Bisa Jadi Anggota

JAKARTA-Panitia Kerja (Panja) Baleg DPR RUU Wantimpres bersama Pemerintah batal mengubah nomen-klatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Mereka menyetujui pasal yang menyebutkan Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres) RI menjadi lembaga negara.

Hal ini disepakati dalam rapat panitia kerja RUU Wantimpres yang digelar Selasa (10/9/2024).

"Jadi rumusannya Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud undang-undang ini. Pemerintah (bagaimana)?" kata Pimpinan Baleg DPR RI Achmad Baidowi (Awiek) saat memimpin rapat. "Setuju," jawab Awiek.

Usai rapat panja, Awiek pun menjelaskan lebih lanjut mekanisme pembentukan Wantimpres sebagai lembaga negara.

Ia menjelaskan, jika RUU ini di sahkan, maka para anggota Wantimpres RI akan menjadi pejabat negara.

"Karena struktur kelembagaannya itu Wantimpres RI ini menjadi lembaga negara, maka otomatis pejabatnya lembaga negara dong," jelas Awiek.

Dalam aturan itu juga disepakati pasal yang menyebutkan terpidana dengan hukuman penjara di bawah 5 tahun berkesempatan menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI).

Dalam DIM, salah satu poin menyebutkan, anggota Wantimpres RI tidak pernah dijatuhi pidana di atas lima tahun penjara. "Tidak pernah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih," demikian bunyi pasal yang diusulkan pemerintah.

Awiek selaku pimpinan rapat menanyakan persetujuan pasal ini kepada para anggota Baleg dan pemerintah apakah menyetujui perubahan pasal ini. "Oh kembali ke UU lama? Bagaimana fraksi kembali ke undang-undang lama bahwa yang di atas pidana lima tahun itu tidak boleh setuju ya?" tanya Awiek. "Setuju," kata



para anggota rapat.

Awiek kemudian juga menjelaskan bahwa Wantimpres RI tidak boleh rangkap jabatan. "Enggak boleh, enggak boleh merangkap, tidak boleh merangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya," tuturnya.

Mayoritas fraksi dalam Panitia Kerja Baleg menyetujui hal tersebut. Salah satu pertimbangan yang menjadi dasar kesepakatan itu agar tidak ada kerancuan terkait subjek presiden yang dimaksud dalam RUU ini.

"Setuju ya dibungkus nih," kata Wakil Ketua Baleg Achmad Baidowi dalam rapat. "Jadi (namanya) Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia," sambungnya.

Ketua Dijabat Bergiliran

Dalam rapat tersebut, Panja Baleg bersama Pemerintah juga sepakat jabatan ketua dewan pertimbangan presiden Republik Indonesia dapat dijabat secara bergantian.

Salah satu pertimbangan kesepakatan itu adalah Indonesia menganut sistem presidensial sehingga presiden seharusnya diberikan keleluasaan untuk menentukan para sosok pemberi penasihat.

"Setuju ya usulan pemerintah? Pak jenderal?" tanya Awiek dalam rapat.

"Siap pimpinan untuk yang ini kami setuju," kata Anggota Baleg Fraksi PDIP Sturman Panjaitan.

"Ini tanda-tanda ini kalau udah setuju ini ketuk ya," timpal Awiek.

Usulan agar ketua Wantimpres bisa dijabat bergantian diusulkan oleh pihak pemerintah. Saat itu panitia kerja (Panja) DPR RUU Wantimpres mendalami Daftar Inventarisir Masalah (DIM) 23 ayat 2.

Klausul tersebut isinya "Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh presiden".

Tapi Pemerintah mengusulkan supaya ketua Wantimpres dapat dijabat secara giliran. "Usulan Pemerintah: ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat secara bergantian di antara anggota yang ditetapkan oleh Presiden," bunyi usulan Pemerintah dalam DIM 23 yang dibacakan dalam Rapat Panja.

M e n k u m h a m Supratman Andi Agtas menyebut, prinsipnya usulan itu mengikuti sistem presidential. Politikus Partai Gerindra itu mengatakan, regulasi tersebut termasuk kebutuhan presiden.

Pada rapat ini, pemerintah melampirkan sebanyak 52 butir DIM dengan rincian 27 DIM bersifat tetap, 8 butir mengalami perubahan substansi, 14 butir mengalami perubahan substansi dan penambahan baru sebanyak 3 butir.

Seusai rapat, Baidowi menjelaskan jika figur yang diberi amanah menjadi Wantimpres RI tidak diperkenankan untuk mengisi jabatan lainnya. "Tidak

Anggota Wantimpres periode 2019-2024 sebagaimana tertuang dalam Keppres tersebut ialah:

-  **Wiranto**, sebagai ketua merangkap anggota;
-  **Dato Sri Tahir**, sebagai anggota;
-  **Muhammad Luthfi**, sebagai anggota;
-  **Putri Kus Wisnu Wardani**, sebagai anggota;
-  **Agung Laksono**, sebagai anggota;
-  **Sidarto Danusubroto**, sebagai anggota;
-  **Soekarwo**, sebagai anggota;
-  **Muhammad Mardiono**, sebagai anggota;
-  **Arifin Panigoro**, sebagai anggota (saat ini sudah meninggal).

boleh merangkap jabatan dengan pejabat negara lainnya," kata Baidowi.

Sebelumnya, ketentuan dalam Pasal 1 A draf RUU Wantimpres mengatur Dewan Pertimbangan Presiden akan berubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung.

"Dengan Undang-Undang ini ditetapkan Dewan Pertimbangan Presiden berubah nama menjadi Dewan Pertimbangan Agung," demikian bunyi Pasal 1A dalam draf RUU. Pasal ini adalah pasal baru yang disisipkan di antara pasal 1 dan 2. (tro, wid, ant, rls/ dya)



Achmad Baidowi
Pimpinan Baleg DPR RI

Achmad Baidowi
Pimpinan Baleg DPR RI

Kala Menkominfo Turun Tangan Selidiki Akun Fufufafa: Bukan Milik Gibran



Bukanlah,
bukan
(Gibran),"

Budi Arie
Menkominfo

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiyadi mengatakan, pihaknya tengah mendalami akun media sosial Kaskus, Fufufafa yang diduga milik wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka. Budi menyebut akun yang berisi hinaan kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto itu bukan milik putra sulung Presiden Joko Widodo.

"Bukanlah, bukan (Gibran)," kata Budi saat ditemui di DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Budi Arie menyampaikan, kejadian itu sudah lama terjadi. Bahkan, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah mendalaminya. "Iya maksudnya sudah kita pelajari lah," ujar Budi.

Namun, Budi Arie enggan mengungkap pemilik akun itu. Sebab, hal itu masih didalam. "Kita enggak tahu, tunggu lagi. Tunggu saja entar ada waktunya," kata dia.

Belakangan viral lagi unggahan lama akun Kaskus Fufufafa yang berisi cacian kepada Prabowo. Unggahan itu terjadi pada 2019 lalu.

Unggahan itu menjadi perbincangan hangat di media sosial (medsos) X (dulu Twitter). Dilansir dari unggahan akun Fufufafa antara lain menyerang presiden terpilih Prabowo Subianto dan keluarganya.

Terkait hal ini, Gibran merespons dengan menyuruh awak media bertanya langsung ke pemilik akun. "Lha mbuh, takono sing nduwe akun (ndak tahu, tanya saja pemilik akunnya)," ucap Gibran di Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9/2024).

Tak cuma menyerang Prabowo dan keluarganya, Fufufafa juga berkomentar negatif pada buruh, serikat buruh, dan terdapat juga komentar bernada cabul.

Sebelumnya, Stafsus Presiden, Grace Natalie, mengatakan jangan asal langsung menuding.

"Kan belum pasti ya, enggak tahu

punya beliau atau enggak," kata Grace di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/9/2024).

Grace meminta agar akun tersebut diteliti dulu kebenarannya apakah memang akun milik Gibran atau bukan. "[Harus] Dipastikan dulu [pemilik akunnya]," ujar pendiri PSI ini.

Soal Jet Pribadi Kaesang

Tak hanya itu, Menkominfo Budi Arie ditanyai terkait polemik pesawat jet pribadi Gulfstream G650ER yang digunakan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama istrinya, Erina Gudono, saat pergi ke Amerika Serikat.

Budi Arie yang juga Ketua Relawan Pro Jokowi (Projo) ini, mengatakan hal itu adalah urusan pribadi Kaesang. Pesawat jet itu juga adalah milik teman Kaesang.

"Gak ada, dia kan pribadi. Nah itu dari temennya," kata Budi Arie di Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Budi Arie meminta publik tak lagi mempermasalahkan hal tersebut. Menurutnya, penggunaan jet pribadi itu karena kondisi Erina Gudono yang tengah hamil sehingga tak dapat menggunakan angkutan umum atau pesawat komersil lainnya.

"Pokoknya udahlah. Satu, istrinya Mas Kaesang itu kan hamil sudah 8 bulan. Kan gak boleh naik angkutan umum, pesawat umum mana boleh?," ujarnya.

Saat disinggung dugaan gratifikasi dalam penggunaan jet itu, Budi Arie menilai, Kaesang tak dapat dikaitkan dengan hal tersebut.

Dia juga menambahkan bahwa Kaesang bukan pejabat publik. "Lho tidak bisa, itu temennya kok. Sama kayak saya pinjemin kamu, teman," imbuhnya. "Bukan pejabat publik Mas Kaesang," tandasnya.

Warganet mulanya mengaitkan Gibran dengan Fufufafa lantaran sebuah unggahan di media sosial. Dalam unggahan itu, Fufufafa pernah mengaku jika ID aslinya adalah Raka Gnarly. Ketika itu, Fufufafa tak bisa login di akun Raka Gnarly karena lupa kata sandi.

Warganet kian yakin Gibran pemilik Fufufafa lantaran akun Twitter (kini X) Chili Pari Catering juga pernah mencuit tak bisa login di akun Raka Gnarly. Chili Pari Catering merupakan usaha catering Gibran di Kota Solo.

Fufufafa memicu polemik lantaran komentar-komentarnya di beragam unggahan di Kaskus yang cenderung memojokkan Prabowo Subianto. Komentar itu bahkan dianggap menjerus pada penghinaan.

"Tentara pecatan, cerai, anak melambai, pendukungnya radikal, partai koalisi gak all out mendukung," tulis akun Fufufafa pada salah satu thread.

Pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019, Prabowo dan Jokowi masih berseberangan. Seusai Pilpres 2019, Jokowi membawa Gerindra ke gerbong pemerintahan dan mengangkat Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Pada Pilpres 2024, Prabowo menggandeng Gibran sebagai cawapres.

Pengamat Politik Ray Rangkuti menilai terkuatnya jejak digital Fufufafa yang diduga dimiliki Gibran bisa memperburuk atau bahkan merusak hubungan Prabowo dan Jokowi. Ray memandang sudah ada benih ketidakcocokan antara Prabowo dan Jokowi.

"Akar ketidakharmonisan keduanya ini makin meningkat. Selama ini, lebih pada soal sharing power. Ini sudah menyangkut ke persoalan pribadi. Jadi, ini campuran sharing power dan persoalan personal," ujarnya. (sum,rls,ist/dya)

KONTROVERSI GIBRAN

Pencalonan wakil presiden

Pencalonan Gibran sebagai wakil presiden dianggap kontroversial karena usianya yang masih muda yaitu 36 tahun. Sebagaimana Mahkamah Konstitusi di bawah kepemimpinan Anwar Usman telah memutuskan bahwa ia dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden melalui pengecualian bagi pemimpin daerah terpilih, Kelayakan Gibran untuk pencalonan telah berulang kali ditentang. KPU terbukti melakukan pelanggaran etik seputar pendaftaran cawapres Gibran karena mengizinkan Gibran mendaftarkan pencalonannya sebelum komisi menyesuaikan batas minimal usia calon dalam aturan internalnya. Gugatan diajukan oleh Kelompok Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) dan Gerakan Advokat Indonesia (Perekat Nusantara) terhadap Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Anwar Usman dan Ibu Negara Iriana dengan tuduhan nepotisme dan dinasti politik di pihak tergugat, namun diberhentikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sehari sebelum pemilu. Karena keputusan tersebut dan kurangnya pengalaman politik Gibran, ia disebut sebagai "nepo baby" oleh Al Jazeera.

Kesalahan asam sulfat

Dalam salah satu kegiatan kampanyenya pada 3 Desember 2023, Gibran menyampaikan bahwa salah satu solusi stunting bagi ibu hamil adalah dengan mengonsumsi asam sulfat daripada asam folat, yang menurutnya meminta maaf dan kemudian mengoreksi dirinya sendiri pada hari berikutnya. Atas pernyataannya tersebut, ia diejek oleh pendukung rivalnya bahkan Anies Baswedan yang terang-terangan mengejeknya dengan mengatakan bahwa ibu hamil hanya bisa mendapatkannya dari makanan nabati dan bukan dari bengkel.



Tuntut KPU Jelaskan Penggunaan Rp 76,6 T Dana Pemilu Disentil Pakai Private Jet hingga Buat Film Rp 10 M

JAKARTA-Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku menyesal telah menyetujui anggaran sebesar Rp 76,6 triliun buat KPU menyelenggarakan Pemilu 2024 pada 24 Februari silam.

Penyesalan ini muncul karena belakangan mulai terbongkar aib KPU yang dinilai tidak transparan dalam melaporkan penggunaan anggaran ini. Anggaran Rp 76,6 T buat Pemilu ini berasal dari APBN alias pajak rakyat.

"Saya membela bapak-ibu itu, berapa pun anggaran yang disampaikan, bahkan kita bisa mendesak Menkeu, badan anggaran supaya anggaran harus diterima total Rp 76,6 T. Anggaran Pemilu dianjurkan KPU Rp 76,6 T, Bawaslu Rp 33 [T], sekian," kata Doli Selasa (10/9/2024).

"Tapi akhirnya kalau cerita Bu Reska, Arteria, ini mulai ada penyesalan buat saya, karena menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan buat gaya hidup bapak jadi mewah. Saya tadi terkejut ada rumah dinas, ada apartemen, coba sekjen klarifikasi," tambah dia.

Politikus Golkar ini juga menyoroti private jet yang pernah dipakai eks Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari untuk berkeliling ketika Pemilu.

"Kedua private jet, saya tidak menduga, tapi laporannya ada, itu diakui pakai APBN," ucap Doli.

Selain itu, Komisi II mempertanyakan alasan KPU membuat 2 film selama Pemilu dan Pilkada yakni 'Kejarlah Janji dan Tagihlah Janji'.

"Paling nyata film. Coba jelaskan sama kami, apa output film dibuat? Seingat saya buat film Rp 10 M. Sekarang 2 film bayangkan, siapa yang nonton itu film? Kenapa terpikir buat film? Apakah untuk sosialisasi? Sejauh apa efeknya terhadap partisipasi dan pemahaman publik terhadap Pemilu?" kata Doli.

Komisi II juga mempertanyakan alasan KPU yang mau membuat Akademi Pemilu Indonesia. Ia menilai, tidak ada urgensi pembentukan ini

"Yang lebih lucu, ini bapak dan ibu minta buat Akademi Pemilu Indonesia. Ini 5 tahun enggak ada Pemilu bapak mau ngajar buat kampus? Maksudnya bapak ibu ini kelebihan duit mau buat akademi? Mau berbisnis?" tutur Doli.

Diketahui, KPU RI mengusulkan pembentukan Akademi Kepemiluan di 2025. Sumber dana usulan tersebut



Ketua DPR RI Puan Maharani (tiga kiri) berfoto dengan Iffa Rosita (dua kanan), komisioner Komisi Pemilihan Umum RI masa jabatan 2022-2027 menggantikan Hasyim Asy'ari, Selasa (10/8/2024).ist

berasal dari pagu anggaran KPU RI pada 2025 yakni Rp3.062.311.327.000.

Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan, usulan pembentukan akademi tersebut dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat Jenderal KPU hingga jajaran di daerah.

"Sebagai salah satu sumber rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan PNS di Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang siap pakai, mengingat masih sangat minim dan belum merata," ujar Afif dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Selain itu, akademi kepemiluan diperlukan untuk mencari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagai pengganti PNS yang akan memasuki masa purna bakti.

"Kebutuhan kualitas PNS yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi pendidikan kepemiluan di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota," kata dia.

Atas penyampaian tersebut, KPU berharap agar Komisi II DPR RI menyetujui usulan baru tersebut. "KPU berharap pada Komisi II DPR agar memberikan persetujuan alokasi pagu

anggaran tahun 2025 dan usulan kegiatan baru yaitu pendirian Akademi Pemilihan Umum untuk jajaran KPU RI," kata Afif.

Iffa Sah Gantikan Hasyim

Di sisi lain, DPR menetapkan pergantian antarwaktu Komisioner KPU RI periode 2022-2027. DPR mengesahkan Iffa Rosita sebagai Komisioner KPU RI menggantikan Hasyim Asy'ari yang diberhentikan karena pelanggaran etik.

Rapat digelar di ruang sidang paripurna Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat tersebut.

Mulanya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan laporan proses penetapan Komisioner KPU RI terpilih usai Hasyim diberhentikan. Dia mengatakan Iffa dipilih berdasarkan urutan hasil fit and proper test para calon anggota KPU RI periode 2022-2027.

Setelah itu, pimpinan DPR menerima laporan dari Doli. Puan pun menanyakan per-setujuan dari para anggota rapat.

"Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat. Apakah laporan Komisi II DPR RI atas penetapan



Tapi akhirnya kalau cerita Bu Reska, Arteria, ini mulai ada penyesalan buat saya, karena menurut saya ternyata anggaran yang kita perjuangkan buat gaya hidup bapak jadi mewah. Saya tadi terkejut ada rumah dinas, ada apartemen, coba sekjen klarifikasi,"

Ahmad Doli Kurnia

Ketua Komisi II DPR RI

RINCIAN ALOKASI ANGGARAN PEMILU 2024

Data Kemenkeu 2022-2024



KETERANGAN

Anggaran Pemilu dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

PERBANDINGAN ANGGARAN PEMILU

Data Kemenkeu 2019-2024



FAKTOR KENAIKAN ANGGARAN

- Kenaikan honor untuk anggota Badan Adhoc yang bertugas dalam penyelenggaraan Pemilu.
- Pelaksanaan pemilihan yang dilakukan serentak pada tahun yang sama
- Peningkatan keamanan, teologi informasi, dan penanganan sengketa dalam proses Pemilu

pergantian antarwaktu anggota KPU masa jabatan tahun 2022-2027 tersebut dapat disetujui dan ditetapkan?" tanya Puan yang dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Sebelumnya, Doli mengatakan proses PAW tersebut sebenarnya sudah dilakukan 3 minggu lalu. Ia menyebut Iffa yang juga komisioner KPU wilayah Kalimantan Timur menyatakan kesediaannya menjabat sebagai komisioner KPU. (tro,wid,rls,ist/dya)

Pilkada 2024 Kabupaten Malang 17 Ribu Pemilih Pemula Belum Lakukan Perekaman e-KTP



Pelaksanaan perekaman e-KTP bagi pemilih pemula di Kabupaten Malang. (dok. Dispendukcapil Kab Malang)

MALANG - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024, sebanyak 17.153 pemilih pemula di Kabupaten Malang belum melakukan perekaman e-KTP.

"Pemilih pemula yang belum terekam ini adalah anak-anak yang kini berusia 16-17 tahun. Jadi, pada 27 November 2024 nanti, mereka akan genap berusia 17 tahun, ini sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) KPU Kabupaten Malang," ujar Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi

Kependudukan (PIAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Malang, Subianto, Selasa (10/9/2024).

Subianto mengungkapkan, dari total 52.541 pemilih pemula yang terdata, sebanyak 35.385 anak atau 67,35 persen telah melakukan perekaman. Namun, hingga awal September 2024 ini masih tersisa 32,65 persen atau 17.153 anak yang belum terekam.

"Cut-off data kami adalah 30 Agustus 2024, dan hingga saat ini baru

67,35 persen dari target yang telah tercapai. Ya, harapannya seluruh pemilih pemula dapat segera menyelesaikan perekaman agar terdaftar sebagai pemilih tetap," ungkap Subianto.

Untuk mempercepat proses perekaman, menurutnya Dispendukcapil berencana mengirimkan surat kepada seluruh 33 camat di Kabupaten Malang. Surat tersebut berisi data pemilih pemula yang belum terekam, dilengkapi dengan nama dan alamat mereka (by name by address).

Tidak hanya itu, Subianto menyampaikan, Dispendukcapil juga akan mengencarkan program jemput bola dengan mendatangi sekolah-sekolah.

Mengingat sebagian besar pemilih pemula merupakan siswa SMA/SMK, pihaknya akan berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

"Kami ingin memastikan bahwa semua siswa terdata dan siap menggunakan hak pilih mereka pada Pilkada nanti," tambahnya.

Namun demikian, ada sejumlah kendala yang dihadapi di lapangan. Dijelaskannya, beberapa siswa yang terdata sebagai pemilih pemula tidak

dapat melakukan perekaman karena sedang mengikuti kegiatan seperti magang di luar Kabupaten Malang atau menempuh pendidikan di pondok pesantren di luar daerah. (Santi/Dya)



Pemilih pemula yang belum terekam ini adalah anak-anak yang kini berusia 16-17 tahun. Jadi, pada 27 November 2024 nanti, mereka akan genap berusia 17 tahun, ini sesuai dengan hasil pencocokan dan penelitian (coklit) KPU Kabupaten Malang,"

SUBIANTO

Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Dispendukcapil Kabupaten Malang

DPRD Kota Malang Usulkan Rakor Khusus soal Dana Porprov 2025 Senilai Rp 51 M

MALANG - Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, mengusulkan dilaksanakannya rapat koordinasi (rakor) khusus, untuk membahas alokasi anggaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Timur 2025.

Pengelolaan anggaran yang diperkirakan mencapai Rp 51 miliar ini, dinilai Made penting untuk diserahkan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar), alih-alih kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Malang.

"Ini ternyata tidak boleh dianggap sepele. Rp 51 miliar ini belum dianggarkan di APBD 2025 yang kemarin (pembahasan awal) dilempar oleh Pj Wali Kota Malang sebelumnya. Sehingga posturnya kalau PAD tidak bisa ditambah, ini pasti akan mengurangi belanja OPD yang lain," ujar Made, Selasa (10/9/2024).

Made menjelaskan, anggaran yang semula diajukan sebesar Rp 125 miliar telah mengalami penyesuaian menjadi Rp 65 miliar, dan terakhir menjadi Rp 51 miliar. Namun, hingga saat ini,

anggaran tersebut juga belum masuk dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2025.

Lebih lanjut, Made menyarankan agar Disporapar menjadi pengelola anggaran terkait Porprov 2025. Mengingat tugas KONI yang lebih fokus pada urusan olahraga, sedangkan Disporapar memiliki tanggung jawab atas pengelolaan infrastruktur terkait olahraga.

Ia menilai, pengelolaan oleh KONI berisiko tinggi terkait pertanggungjawaban anggaran. "Karena kalau diserahkan pada KONI, ini menurut saya sangat berisiko di SPJ pertanggungjawabannya. Kami hanya butuh kepastian siapa yang meng-SPJ-kan, serahkan saja pada ahlinya, tentu saja ASN terkait. Dewan agak ragu kalau di KONI karena anggarannya terlalu besar," tuturnya.

Made juga menyebutkan, anggaran sebesar Rp 51 miliar tersebut sudah termasuk untuk perbaikan infrastruktur seperti Stadion Gajayana, GOR Ken Arok, beberapa sarana kolam renang, serta venue

pertandingan lainnya.

Selain itu, sambungnya, Rp 20 miliar diantaranya dialokasikan untuk bonus atlet. Made juga mengungkapkan keraguan terhadap pengelolaan bonus atlet oleh KONI, mengingat bonus dapat bervariasi tergantung prestasi atlet.

"Nah terkait bonus tadi juga menurut saya harus diampu Disporapar, jangan KONI. Bonus ini kan bisa kurang, bisa lebih. Tergantung prestasinya nanti. Kalau lebih bisa jadi SILPA, kalau kurang kan akan menimbulkan permasalahan," jelasnya.

Made berharap, rakor khusus segera dilakukan untuk memastikan pengelolaan anggaran Porprov Jatim 2025 dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, serta memastikan tidak



Ketua Sementara DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, Selasa (10/9/2024). (Santi/Lenteratoday)

ada kendala dalam pelaksanaannya.

"Seharusnya langsung saja ke Disporapar, kami lebih percaya ke Disporapar untuk pengelolaan anggarannya karena itu banyak yang sifatnya infrastruktur," tukasnya. (Santi/Dya)

RISTY TAGOR

Kembali Setelah 15 Tahun

SETELAH 15 tahun berhenti berakting, aktris Risty Tagor akhirnya kembali ke layar lebar. Kali ini, Risty berperan sebagai Tanish, pemeran pendukung di Film Home Sweet Loan yang akan tayang pada 26 September 2024.

Film terakhir yang diperankan Risty sebelum rehat panjang adalah Perempuan Berkalung Sorban (2009). Setelah lama tak main film, baru sekitar 2023 Risty mengungkapkan keinginannya untuk kembali berperan di film.

"Aku merasa sangat penuh syukur, apalagi aku dapat kesempatan kembali setelah 15 tahun. Hidup itu pilihan, aku memilih untuk mengabdikan sama anak-anak. Tahun kemarin aku bilang, 'Kayaknya aku pengen main film, deh.' Tiba-tiba, Tuhan entah gimana, Kak Sabrina (sutradara Home Sweet Loan hubungi aku," ujarnya saat konferensi pers di Jakarta.

Risty baru "berani" kembali berakting setelah anak-anaknya menginjak usia sekolah. Kini, anak tertuanya sudah duduk di bangku SMP, sementara anak bungusnya di bangku SD.

Karena sudah lama tak berakting, Risty jadi sangat berdebar-debar saat casting. Istirahat dari dunia seni peran membuat ia merasa seperti memulai segalanya dari nol lagi. Namun, pada akhirnya, Risty berhasil melewati tantangan tersebut.

Menjalani kedekatan dengan para pemeran lain di film ini pun tidak sulit bagi Risty. Ia sudah mengenal beberapa pemain, seperti Derby Romero dan Yunita Siregar. Hanya Fita Anggraini yang baru ia kenal.

Namun, keseruan para pemeran membuat Risty cepat akrab dengan mereka. Kebetulan, Risty, Derby, Yunita, dan Fita dikisahkan sebagai

empat sahabat di film ini.

Bicara soal sahabat, Risty senang berperan sebagai Tanish yang menjadi sahabat karakter utama, yaitu Kaluna (diperankan Yunita Siregar).

Menurut dia, sahabat bisa jadi saudara tidak sedarah. Sahabat pula yang setia mendengarkan curahan hati tanpa menghakimi.

Itulah peran Tanish di film Home Sweet Loan. Film ini berkisah tentang perjuangan pekerja yang juga menanggung beban sebagai generasi roti lapis (sandwich generation).

Sebagai generasi roti lapis yang mesti membiayai kehidupan keluarga, berat rasanya memimpikan masa depan yang indah dan sejahtera. Menyisihkan uang untuk diri sendiri saja sulit....

"Sandwich generation itu ada banyak versi dengan level yang berbeda-beda. Namun, ada juga yang beruntung tidak merasakan hal ini," ujar Risty.

Profil

Wanita bernama lengkap Ariestia Ramadhany Tagor Harahap ini mengawali karier di dunia hiburan sejak kecil dengan menjadi model iklan.

Saat duduk di bangku SMA, ia memberanikan diri memulai kariernya di layar kaca dengan membintangi FTV, sinetron maupun film. Nama Risty Tagor semakin eksis di dunia hiburan setelah

berperan di film Pocong 2 yang disutradarai oleh Rudi Soedjarwo.

Dalam perkembangannya, ia lebih sering membintangi sinetron dibandingkan film. Film yang pernah ia bintangi selain Pocong 2 adalah Best friend? (2008), Musik Hati (2008), dan Perempuan Berkalung Sorban (2009).

Sedangkan untuk sinetron, ia sudah membintangi lebih dari 10 judul sinetron. Beberapa di antaranya, yaitu Pengantin Remaja (2006), Doo Bee Doo (2007-2008), Kemilau Cinta Kamila (2010), dan Putri yang Ditukar (2011).(berbagai sumber)

“

Aku merasa sangat penuh syukur, apalagi aku dapat kesempatan kembali setelah 15 tahun. Hidup itu pilihan, aku memilih untuk mengabdikan sama anak-anak. Tahun kemarin aku bilang, 'Kayaknya aku pengen main film, deh.' Tiba-tiba, Tuhan entah gimana, Kak Sabrina (sutradara Home Sweet Loan hubungi aku,"





Microsleep: Apa Itu, Penyebab, dan Cara Menghindarinya

MICROSLEEP adalah kondisi tidur singkat, biasanya hanya beberapa detik, yang terjadi tanpa disadari. Meskipun singkat, microsleep bisa berbahaya, terutama saat melakukan aktivitas berisiko tinggi seperti mengemudi atau mengoperasikan mesin berat.

Fenomena ini sering dikaitkan dengan kurang tidur atau kelelahan ekstrem yang mengakibatkan otak secara otomatis memasuki fase tidur meskipun seseorang sedang terjaga.

Apa Itu Microsleep?

Secara medis, microsleep adalah episode tidur singkat yang terjadi ketika otak secara otomatis memasuki fase tidur, biasanya karena kurang tidur. Kondisi ini dapat berlangsung antara 1 hingga 30 detik. Orang yang mengalami microsleep mungkin tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur dan sering kali tidak dapat mengingat apa yang terjadi selama periode tersebut.

Gejala microsleep sering tidak kentara, seperti mata yang tiba-tiba terpejam, kepala yang tersentak, atau kehilangan perhatian sesaat. Meskipun singkat, microsleep sangat berbahaya, terutama jika terjadi di situasi yang membutuhkan kewaspadaan penuh.

Penyebab Microsleep

Ada beberapa faktor utama yang dapat memicu terjadinya microsleep, di antaranya:

1. Kurang Tidur

Penyebab utama microsleep

adalah kurang tidur. Orang yang tidur kurang dari 7-8 jam per malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami episode microsleep.

Kurang tidur mengurangi kemampuan otak untuk tetap terjaga dan waspada, sehingga meningkatkan kemungkinan microsleep.

2. Kelelahan Mental

Aktivitas yang membutuhkan konsentrasi tinggi dalam jangka waktu lama, seperti mengemudi jarak jauh atau bekerja dengan tugas yang monoton, dapat menyebabkan kelelahan mental. Ketika otak terlalu lelah, kemungkinan untuk mengalami microsleep meningkat.

3. Shift Kerja Malam

Pekerja shift malam memiliki risiko lebih tinggi mengalami microsleep karena mereka sering kali harus bekerja di saat tubuh secara alami membutuhkan istirahat. Gangguan ritme sirkadian akibat bekerja di malam hari bisa menyebabkan kurang tidur dan meningkatkan kelelahan.

4. Gangguan Tidur

Masalah kesehatan seperti sleep apnea, insomnia, atau gangguan tidur lainnya juga dapat menyebabkan microsleep. Gangguan ini mempengaruhi kualitas tidur seseorang sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap kantuk di siang hari.

5. Mengemudi Jarak Jauh

Mengemudi jarak jauh dalam

waktu lama, terutama di malam hari, bisa memicu microsleep. Kurangnya rangsangan visual dan monotoninya perjalanan membuat otak lebih cepat merasa lelah, meningkatkan risiko microsleep.

Bahaya Microsleep

Meskipun terjadi dalam hitungan detik, microsleep dapat menimbulkan risiko yang sangat serius. Berikut adalah beberapa bahaya yang terkait dengan microsleep:

1. Kecelakaan Lalu Lintas

Salah satu risiko terbesar microsleep adalah kecelakaan lalu lintas. Ketika pengemudi mengalami microsleep, mereka bisa kehilangan kontrol kendaraan dalam hitungan detik, yang dapat menyebabkan kecelakaan fatal.

2. Kecelakaan Kerja

Pekerja yang menangani mesin berat atau melakukan pekerjaan berbahaya berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja jika mereka mengalami microsleep. Kehilangan konsentrasi sejenak dapat menyebabkan kesalahan fatal.

3. Gangguan Kinerja

Microsleep juga dapat memengaruhi kinerja seseorang, terutama dalam pekerjaan yang memerlukan konsentrasi tinggi.

Orang yang sering mengalami microsleep mungkin mengalami penurunan produktivitas dan kualitas kerja yang buruk.

Cara Mengantisipasi Microsleep

Mencegah microsleep sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kinerja sehari-hari.

Berikut adalah beberapa cara untuk mengantisipasi dan mengurangi risiko terjadinya microsleep:

1. Tidur Cukup

Cara paling efektif untuk mencegah microsleep adalah dengan mendapatkan tidur yang cukup, yaitu 7-8 jam per malam. Tidur yang cukup akan membuat otak lebih segar dan mampu berkonsentrasi dengan baik sepanjang hari.

2. Hindari Monotoni

Jika Anda harus melakukan aktivitas yang monoton, seperti mengemudi atau bekerja di depan komputer, cobalah untuk mengambil istirahat secara teratur. Berhenti sejenak setiap beberapa jam untuk merilekskan otak dan tubuh.

3. Konsumsi Kafein Secukupnya

Mengonsumsi minuman berkafein seperti kopi atau teh bisa membantu Anda tetap terjaga. Namun, pastikan untuk tidak mengonsumsinya secara berlebihan, karena kafein yang terlalu banyak bisa mengganggu kualitas tidur Anda di malam hari.

Pekerja yang menangani mesin berat atau melakukan pekerjaan berbahaya berisiko tinggi mengalami kecelakaan kerja jika mereka mengalami microsleep. (nei,ist/dya)

Peluncuran iPhone 16 dalam Ajang Apple "It's Glowtime"

APPLE dalam waktu yang tinggal hitungan jam akan mengadakan acara perilisian produk-produk terbarunya yang kali ini bertajuk "Apple It's Glowtime".

Lewat acara ini, Apple akan memperkenalkan setidaknya ponsel pintar seri terbarunya iPhone 16 series, jam tangan pintar baru yang mungkin dikenalkan sebagai Apple Watch 10 series, hingga AirPods generasi terbaru.

Acara ini akan dilangsungkan di Steve Jobs Theater di Apple Park, Cupertino, AS pukul 10 pagi PT pada Senin (9/9/2024) yang artinya bagi masyarakat Indonesia bisa menyaksikannya pada Selasa (10/9/2024) pukul 12.00 siang WIB.

Bagi anda yang tertarik menantikan kehadiran produk-produk baru dari Apple tersebut, anda bisa menyaksikannya secara langsung melalui beberapa cara.

Pertama melalui situs web Apple.com, saat membuka Apple.com anda akan langsung melihat banner acara "It's Glowtime" dan setelah mengkliknya anda akan diarahkan ke siaran langsung.

Karena acara belum dimulai, apabila anda mencoba membuka banner siaran langsung tersebut, maka anda akan diarahkan untuk memasukkan agenda tersebut ke kalender gadget anda.

Cara kedua yang bisa dilakukan untuk bisa melihat pengumuman produk-produk baru dari Apple itu dengan melihatnya di YouTube Apple.

Anda bisa menantikannya dengan cara memilih "Notify Me" di akun YouTube sehingga ketika acara dimulai anda akan mendapatkan notifikasi dan tidak akan ketinggalan acara.

Cara ketiga untuk bisa menyaksikan "Apple It's Glowtime" adalah dengan menontonnya secara langsung melalui aplikasi Apple TV.

iPhone 16 series akan menjadi pusat dari semua acara tersebut, mulai dari model reguler seperti iPhone 16 dan iPhone 16 Plus serta model Pro seperti iPhone 16 Pro dan 16 Pro Max diharapkan dapat diumumkan kali ini.

Untuk peningkatan fisik dari ponsel sendiri nampaknya tak akan terlalu banyak diekspos karena peningkatan besar yang dinantikan banyak pihak untuk peluncuran produk Apple kali ini ialah kemampuan kecerdasan artificial generatifnya Apple Intelligence di dalam iOS 18.

Prosesor baru serba AI

Apple Intelligence akan membutuhkan prosesor yang kuat. Tren Apple dalam beberapa tahun terakhir adalah memberikan prosesor

terbaik generasi sebelumnya ke iPhone model dasar dan memperkenalkan chip baru yang lebih kuat untuk varian Pro.

Prosesor A17 Pro iPhone 15 Pro adalah satu-satunya chip seri A saat ini yang mendukung Apple Intelligence, tetapi rumornya semua model iPhone 16 akan mendapatkan chip A18 yang baru.

Tampilan kamera baru iPhone 16

Model utama iPhone 16 akan hadir dengan warna baru dan terlihat sedikit berbeda dari bagian belakang tahun ini.

Modul kamera diperkirakan akan memiliki dua lensa yang ditumpuk

secara vertikal, seperti iPhone 12 dan iPhone X, alih-alih penempatan diagonal yang digunakan sejak iPhone 13.

Penempatan lensa vertikal akan lebih mendukung pengambilan video spasial lanskap untuk ditonton di Vision Pro.

Tidak ada indikasi bahwa kita akan melihat pembaruan pada Vision Pro itu sendiri, tetapi semoga kita akan mendapatkan sesuatu untuk menjaga minat pelanggan terhadap teknologi mixed reality Apple.

Jajaran iPhone 16 juga akan mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik, menurut analis Apple Ming-Chi Kuo (Lenteratoday)



Tren Botox di Kalangan Anak Muda: Waspada! Risikonya

Botox adalah obat untuk mengurangi kerutan di wajah, serta mengobati migrain kronis, kaku otot, atau overactive bladder. Botox juga digunakan dalam pengobatan cervical dystonia, kedutan di mata, atau keringat berlebih (hiperhidrosis) di ketiak.

Botox dikembangkan dari racun yang dikeluarkan oleh bakteri *Clostridium botulinum*. Namun, botox tidak akan menyebabkan keracunan (botulisme). Ketika disuntikkan ke dalam otot, botox dapat merelaksasi otot dengan cara menghambat aliran sinyal saraf ke otot tersebut. Hal ini membuat otot tidak bisa berkontraksi.

Cara kerja tersebut membuat botox dapat digunakan untuk gangguan yang terkait dengan tegang atau kontraksi otot yang berlebihan. Namun, perlu diketahui bahwa botox hanya meredakan keluhan, tidak menyembuhkan penyakit. Efek botox juga akan berkurang setelah 3-6 bulan sehingga penyuntikan perlu diulang kembali.

Cara Menggunakan Botox Dengan Benar

Botox akan diberikan langsung oleh dokter atau petugas medis dalam pengawasan dokter. Obat akan disuntikkan ke dalam otot (intramuskular/IM).

Disarankan untuk menghindari konsumsi minuman beralkohol setidaknya 1 minggu sebelum penyuntikan. Untuk mencegah memar, hentikan juga penggunaan aspirin dan OAINS 2 minggu sebelum penyuntikan.

Suntikan botox dapat diberikan ke lebih dari satu area, tergantung pada kondisi pasien. Jika hendak melakukan suntik botox untuk mengatasi keringat berlebih, disarankan untuk mencukur bulu ketiak dan tidak menggunakan deodoran atau parfum sehari sebelum disuntik. Hindari berolahraga dan mengonsumsi makanan atau minuman panas 30 menit sebelum suntik botox dilakukan.

Jangan berolahraga, berjemur, atau menggunakan sauna, hingga 2 hari setelah suntik botox. Hindari menggosok-gosok area yang baru disuntik hingga 24 jam setelahnya. Usahakan untuk tetap duduk hingga 4 jam setelah suntik botox dilakukan.

Waktu yang dibutuhkan hingga efek botox terlihat dapat berbeda pada tiap orang. Pada umumnya, efek sudah terlihat dalam 7-14 hari dan akan bertahan selama 3 bulan.

Ulangi suntik botox tiap 3 bulan atau sesuai anjuran dokter guna

mempertahankan efeknya. Disarankan untuk melakukan suntik botox dengan dokter yang sama. Jika ada perubahan, beri tahu kondisi dan frekuensi suntik botox sebelumnya agar pemberian suntik botox dapat disesuaikan.

Tren kecantikan di kalangan Gen Z semakin dinamis seiring dengan pertumbuhan pengguna media sosial. Saat ini, banyak Gen Z yang memilih botox sebagai solusi untuk mengatasi kerutan wajah akibat penuaan, karena merasa kurang percaya diri dengan tampilan mereka.

Botox dianggap sebagai cara cepat untuk memperbaiki penampilan dan mengurangi kerutan.

Menurut survei Akademi Bedah Plastik dan Rekonstruksi Wajah Amerika pada 2022, hampir 75 persen pasien bedah plastik wajah berusia di bawah 30 tahun. Generasi pada usia tersebut sangat cemas terlihat tua meski usia masih di awal 20-an.

Para ahli sebenarnya tidak menyarankan melakukan perawatan menggunakan botox saat usia 20-an. Secara umum kisaran tersebut terlalu dini.

Mengenal Botox

Dilansir dari National Institute of Health, perawatan botox merupakan perawatan yang menggunakan toksin botulinum. Toksin botulinum termasuk ke dalam jenis racun, dengan spektrum yang luas, tergantung indikasi terapeutik dan kosmetik fungsi yang digunakan.

Suntikan dengan toksin botulinum dipercaya efektif untuk banyak gangguan klinis yang melibatkan aktivitas otot tak sadar atau peningkatan tonus otot.

Hal ini juga termasuk ke dalam prosedur kosmetik yang paling umum dilakukan di seluruh dunia, dengan perkiraan hampir 3 juta suntikan per tahun.

Perawatan menggunakan botox yang diklaim aman ternyata memiliki efek samping jangka pendek dan jangka panjang.

Dilansir dari Natural, toksin botulinum yang disuntikkan ke pasien dengan gangguan neuromuskular atau neurologis (misalnya miastenia gravis) dapat mengakibatkan kelemahan otot yang parah.

Ada beberapa kasus yang parah pada pasien dengan suntik botox yang tidak sesuai prosedur. Banyak diantaranya tergantung pada material apa yang digunakan. Hal tersebut tentu bisa memicu efek samping jika tidak diperhatikan. Efek sampingnya bisa meliputi:

1. Bekas luka

keloid di tempat suntikan. Hal itu sangat mungkin terjadi dan ada pula risiko infeksi.

Infeksi sebenarnya sedikit dari komplikasi yang jarang terjadi pada tempat suntikan dan dapat terjadi dengan prosedur apapun yang menembus penghalang kulit. Infeksi dapat berkembang di tempat manapun tempat suntikan dilakukan. Jika area tersebut tidak dipersiapkan dengan baik, kemungkinan infeksi akan lebih besar.

Untuk itu, mencegah infeksi di tempat suntikan harus dilakukan duku prosedur pembersihan dengan larutan antiseptik agar semua residu riasan dihilangkan.

2. Ptosis

dapat terjadi jika suntikan terlalu dekat dengan alis, larutan toksin dapat menyebar ke otot pengangkat kelopak

mata atas yang menyebabkan kelemahan untuk menggerakkan area kelopak mata.

3. Disfagia

merupakan kondisi dimana seseorang kesulitan menelan makanan dan air. Risiko ini terjadi karena suntikan yang diberikan mengarah ke kelenjar ludah utama atau ke otot sternokleidomastoid. Difusi toksin ke otot-otot di sekitarnya dapat menyebabkan masalah ini.

4. Gangguan pernapasan

akan memungkinkan terjadi jika suntikan tidak sengaja mengenai kedua kelenjar submandibular untuk hipersalivasi. Jika berlebihan dapat mengakibatkan keluarnya larutan toksin dari kapsul kelenjar dan ke otot-otot sekitar yang terlibat dalam pernapasan.

5. Kelemahan wajah

dapat disebabkan oleh difusi toksin ke cabang saraf wajah, khususnya ketika disuntikkan ke otot masseter.

6. Nyeri, pendarahan, pembengkakan, memar, infeksi.

Ekimosis atau memar sering terjadi akibat cedera pembuluh darah di tempat suntikan dan paling sering terjadi di sekitar area mata.

Memar ringan mempengaruhi 11 hingga 25 persen pasien.

Komplikasi yang lebih parah terkait dengan cedera pembuluh darah adalah hematoma.

(nei.ist/dya)



Babak Baru Korupsi ... (dari Hal 1)

RUMAH milik Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar di Jakarta Selatan digeledah tim penyidik KPK. Penggeledahan itu rupanya berkaitan dengan penyidikan kasus suap dana hibah Pemprov Jawa Timur.

"Penggeledahan dilakukan penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengurusan dana hibah untuk pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur 2019 sampai dengan 2022," kata jubiir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Selasa (10/9/2024).

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujar Tessa.

Kasus suap dana hibah di Pemprov Jawa Timur ini berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) pada 2022. Saat itu KPK menangkap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simanjuntak dalam OTT yang berlangsung pada 16 Juli 2022.

Dalam kasus itu, KPK kemudian menetapkan empat orang tersangka. Keempat tersangka itu mulai dari Sahat Tua Simanjuntak dan staf ahlinya bernama Rusdi selaku penerima suap. Dua tersangka pemberi suap masing-masing bernama Abdul Hamid selaku Kepala Desa Jelgung di Kecamatan Robatal Sampang, Koordinator Kelompok Masyarakat, serta Ilham Wahyudi alias Eeng selaku Koordinator Lapangan Kelompok Masyarakat.

Tim penyidik KPK kemudian mengembangkan penyidikan kasus tersebut. Pada Juli 2024, KPK mengumumkan adanya puluhan orang yang ditetapkan sebagai tersangka baru.

"Kami sampaikan bahwa pada tanggal 5 Juli 2024 KPK menerbitkan sprindik terkait dugaan adanya TPK dalam pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jatim tahun anggaran 2019 sampai dengan 2022," kata jubiir KPK Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

"Dari penggeledahan tersebut, penyidik melakukan penyitaan berupa uang tunai dan barang bukti elektronik," ujar Tessa

Tessa mengatakan total ada 21 tersangka yang ditetapkan KPK. Para tersangka itu terdiri atas empat tersangka penerima dan 17 tersangka pemberi.

KPK menyebutkan empat tersangka penerima merupakan penyelenggara negara. Sedangkan dari 17 tersangka pemberi, 15 orang merupakan pihak swasta dan 2 lainnya penyelenggara negara.

Sebelumnya, tim penyidik KPK pada hari Jumat, 12 Juli 2024, mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan

korupsi suap pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) dari APBD Provinsi Jawa Timur pada tahun anggaran 2019—2022.

"Mengenai nama tersangka dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka akan disampaikan pada waktunya bilamana penyidikan dianggap cukup," ujar Tessa.

Juru bicara sekaligus penyidik KPK itu menerangkan bahwa penetapan tersangka tersebut berdasarkan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) yang diterbitkan pada tanggal 5 Juli 2024.

"Penyidikan perkara ini merupakan pengembangan dari perkara OTT (operasi tangkap tangan) yang dilakukan terhadap STPS (Sahat Tua P. Simanjuntak) yang merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan kawan-kawan oleh KPK pada bulan September 2022," kata Tessa.

"Sejak Senin, 26 Agustus 2024 sampai dengan Kamis, 29 Agustus 2024, penyidik KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap 65 saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengurusan dana hibah untuk kelompok masyarakat atau pokmas dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2022," kata Tessa.

Tessa mengatakan para saksi tersebut antara lain adalah ketua kelompok masyarakat dan koordinator lapangan yang tersebar di Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Probolinggo.

"Penyidik mendalami terkait proses pengajuan dana hibah, pencairan dana hibah, potongan-potongan dana hibah, serta kebenaran pengelolaan dana hibah," ujarnya.

Meski demikian, pihak KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal apa saja temuan penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya memvonis Wakil Ketua DPRD Jatim nonaktif Sahat Tua P. Simanjuntak hukuman 9 tahun penjara dalam kasus korupsi hibah pokok pikiran (pokir) DPRD Provinsi Jatim pada tahun anggaran 2021.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama 9 tahun dan denda sebesar Rp1 miliar subsidi hukuman selama 6 bulan penjara," kata Hakim Ketua I Dewa Suardhita, Selasa (26/9/2023).

Abdul Halim Iskandar juga pernah diperiksa dalam kasus tersebut. Dia diperiksa sebagai saksi pada Kamis (22/8/2024). Pemeriksaan tersebut merujuk pada jabatan Ketua DPRD Jawa Timur periode 2014-2019 yang pernah diemban oleh Abdul Halim Iskandar.

Setelah diperiksa, Abdul Halim hanya menyebut telah memberikan informasi yang sejaselnya kepada

penyidik KPK. Dia juga membantah ikut menerima aliran suap dalam kasus tersebut.

"Jadi, semua sudah saya sampaikan, pertanyaan saya jawab lengkap, tidak ada satu pun yang terlewat," katanya di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).

Politikus PKB itu membantah pemeriksaannya dalam kasus itu. "Pokoknya waktu urusan Jawa Timur-lah. Kan, bisa DPRD, bisa setelahnya, bisa macam-macam," ucap Halim Iskandar.

Abdul Halim sempat menjabat sebagai Ketua DPRD Jawa Timur (2014-2019). Ia merupakan kakak kandung dari Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Adapun tim penyidik KPK sudah lebih dulu menyita sejumlah dokumen dan BBE usai melakukan penggeledahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di Jalan Pahlawan Kota Surabaya, Jumat (16/8).

Penggeledahan di lantai 5 Gedung Setdaprov diduga merupakan ruangan Biro Kesra Pemprov Jatim. Tim penyidik KPK selesai pada pukul 16.06 WIB.

Dalam proses penyidikan ini, tepatnya pada tanggal 26 Juli 2024, KPK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 965 Tahun 2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri untuk 21 orang.

Mereka atas nama KUS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AI (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); AS (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur); BW, JPP, HAS, dan SUK (swasta).

Kemudian AR, WK, AJ, MAS, AA, AH (swasta) dan FA (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Sampang).

MAH (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur), JJ (Penyelenggara negara/Anggota DPRD Kabupaten Probolinggo, serta AYM, RWS, MF, AM, dan MM dari pihak swasta).

Adapun sejak tanggal 15 hingga 18 Juli 2024 tim penyidik KPK telah melakukan serangkaian kegiatan di Kota Surabaya berupa pemeriksaan saksi-saksi serta penyitaan dokumen terkait.

Negara Rugi Triliunan Rupiah

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga kerugian negara yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) mencapai triliunan rupiah.

Saat ini, KPK masih mengusut dugaan suap pokok pikiran atau pokir untuk mendapati jumlah kerugian negara atas perkara dugaan korupsi dana hibah di Pemprov Jatim. "Terkait kerugian negara ya tadi saya senggol-

senggol sedikit sekitar triliunan itu untuk pokir," kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu Juli lalu.

Untuk hasil sementara, Asep berkata ada sekitar 14.000 pokir proyek di DPRD Jatim dengan nominal sekitar Rp 1 sampai Rp 2 triliun. Uang itu pun dibagi-bagikan ke banyak kelompok masyarakat (pokmas) dalam bentuk proyek pekerjaan, seperti pembangunan jalan desa, selokan, dan lainnya.

Dia menjelaskan uang itu dibagi-bagi untuk proyek dengan nilai yang telah dipatok di bawah Rp 200 juta. "Dilakukan untuk menghindari kewajiban proses lelang," ujarnya.

Menurut Asep, untuk pengadaan dengan nilai di atas Rp 200 juta harus dilakukan melalui lelang. Oleh karena itu, KPK harus mengonfirmasi pokir dan proyek yang begitu banyak sehingga membuat proses penyidikan menjadi lama. (sum,ant,ist,rls,wid/dya)

HARTA KEKAYAAN ABDUL HALIM ISKANDAR

TOTAL
Rp 13,203 miliar

Tanah & bangunan
Rp 8,701 miliar

Kendaraan senilai
Rp 4 juta

Harta Bergerak Lainnya
Rp 135 juta

Surat berharga senilai
Rp 2,686 juta

Kas dan setara kas senilai
Rp 1,265 miliar

Kas dan setara kas senilai
Rp 409,7 juta



Menag Yaqut 2 Kali Mangkir

Pansus Haji Bakal Panggil Paksa Ajak Polisi

JAKARTA- Sudah dua kali Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas mangkir dari panggilan Pansus Haji DPR. Panggilan ketiga akan dilayangkan pekan ini. Bila tetap tidak hadir, maka bakal dilakukannya pemanggilan paksa melibatkan polisi.

Anggota Pansus Haji DPR Marwan Jaffar mengaku telah memanggil dua kali Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk diminta datang memberikan keterangan, namun mangkir.

"Sudah dua kali mangkir. Dan ini akan kita undang lagi supaya hadir. Ini dia buying time saja supaya waktu DPR habis ini," kata Marwan di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024).

Marwan mengaku telah memanggil Yaqut pada Senin (9/9/2024) kemarin untuk datang pada Selasa hari ini. Namun, ia mengatakan Yaqut berdalih sedang menghadiri MTQ di Kalimantan Timur.

Namun, Marwan mengatakan Yaqut justru tak berada di Kaltim melainkan ada di Kantor Kemenag.

"Tapi pada kenyataannya ternyata kita menemukan surat yang ada di dalam Kemenag bahwa hari ini dia sedang melakukan rapat koordinasi di Kantor Kemenag jam 15.00 sore. Jadi bukan menghadiri MTQ," kata dia.

Marwan mengatakan akan memanggil kembali Yaqut untuk ketiga kalinya pada minggu ini untuk hadir ke Pansus DPR.

Ia berjanji bakal memanggil paksa Yaqut jika absen pada pemanggilan ketiga Pansus DPR dengan mengganggopolisi.

"Mangkir lagi ketiga kalinya sesuai dengan UU tentang MPR, DPR, DPD, DPR (UU MD3) panggil ketiga kali dan kalau perlu kita menggunakan polisi memanggil secara paksa," kata dia.

"Minggu-minggu ini harus maraton kita undang, karena waktunya semakin mepet karena kan tinggal tiga minggu lagi kita



Suasana rapat kerja Komisi II DPR RI bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9/2024). (ist)

pelantikan," tambahnya.

Sebelumnya DPR membentuk Pansus Haji untuk menyelidiki berbagai persoalan yang timbul di musim haji 2024 yang kurang maksimal.

Pansus pun terus berjalan dengan menggelar pelbagai rapat dengan sejumlah pihak belakangan ini. Selain menggelar rapat, Pansus Haji juga sempat melakukan inspeksi mendadak alias sidak ke Kantor Kemenag pada Rabu 4 September lalu.

Ada yang Bayar Rp 1,1 Miliar

Terpisah, Anggota Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI Saleh P Daulay sangat kecewa dengan Kementerian Agama (Kemenag) karena tidak memiliki peran dalam menciptakan rasa keadilan bagi calon jemaah haji. Pasalnya, tidak menentukan batas atas biaya yang harus dibayarkan calon jemaah haji khusus.

Sehingga, Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau travel haji bisa mematok biaya tinggi bagi calon jemaah haji khusus. Hal ini akhirnya, bisa saja merusak sistem antrean calon haji yang sudah ada.

Dalam rapat pansus haji bersama Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama (Kemenag) Jaja Jaelani pada Senin (9/9/2024) malam,

Saleh mengungkapkan, ada yang membayar sampai Rp 1,1 miliar untuk naik haji lewat jalur kuota haji khusus.

"Saya bacakan pesan anggota Komisi VIII, dia bilang ini bukti pelunasan biaya haji dengan travel ini ini untuk dipergunakan sebagaimana mustinya. Bapak tahu dia bayar berapa? Dia bayar 71.700 dollar Amerika Serikat (AS)," ujar Saleh dikutip dari YouTube TVR Parlemen.

"Kalau saya kalikan Rp 16.000 itu Rp 1.147.200.000. Ini adil enggak sih? Di mana peran Kemenag di sini? Ini orang mau masuk surga harus bayar ini sekarang. Ini apa loh, apa-apaan haji sampai Rp 1,1 miliar gini, yang (haji) furoda saja enggak sampai segini," katanya lagi.

Sebelumnya, Jaja menjelaskan Kemenag menetapkan bahwa setoran awal pelunasan setoran awal bagi calon jemaah haji khusus 4.000 dollar AS. Lalu, pelunasannya sebesar 4.000 dollar AS. Oleh karena itu, Jaja mengatakan, Kemenag menetapkan biaya bagi calon haji khusus sebesar 8.000 dollar AS.

"Kita hanya menentukan batas minimalnya. Batas atasnya kita tidak menentukan. Enggak ada itu dalam undang-undang," kata Jaja.

Sementara itu, menurut Jaja, besaran yang akhirnya dibayar calon

jemaah haji khusus dengan PIHK adalah kesepakatan di antara mereka. "Batas atas (biaya) kesepakatan antara jemaah dan PIHK," ujar Jaja.

Dalam rapat, Pansus Haji memang mencecar Jaja Jaelani perihal 3.503 jemaah haji tahun 2024 yang langsung berangkat. Padahal, lumrahnya ada masa tunggu sehingga seharusnya berangkat pada 2031. Jaja pun menjawab bahwa calon jemaah haji tersebut memang seharusnya berangkat pada tahun 2030-an.

Namun, dia mengungkapkan, masih tersisa sekitar 4.000-an kuota haji khusus sehingga dimintakan kepada PIHK untuk mengisi kuota tersebut. "Di dalam pengisian kuota, saya sampaikan kepada PIHK kuota tambahan setelah diisi dari kuota 10.000. Yang nomor urut itu kan sebanyak 9.400 jadi masih ada 4.000," kata Jaja. (tro,ist,ant,ytb/dya)

10 Wilayah RI dengan Daftar Tunggu Haji Paling Cepat

Kabupaten Maluku Barat Daya

11 Tahun

Kabupaten Seram Bagian Timur

13 Tahun

Kabupaten Maybrat

13 Tahun

Kabupaten Wondama

13 Tahun

Kabupaten Maluku Tenggara

14 Tahun

Kota Ambon

14 Tahun

Kabupaten Buru Selatan

14 Tahun

Kabupaten Seram Bagian Barat

14 Tahun

Kabupaten Kepulauan Sula

14 Tahun

Kabupaten Landak

14 Tahun

5 NEGARA DENGAN KUOTA TERBANYAK

